

NASKAH AKHIR
15 Desember 2011
PUKUL 17.00 WIB.



**PIDATO KETUA DPR RI
PADA RAPAT PARIPURNA DPR RI
PENUTUPAN MASA SIDANG II
TAHUN SIDANG 2011-2012**

JUM'AT, 16 DESEMBER 2011

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
2011**



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**PIDATO KETUA DPR RI
PADA RAPAT PARIPURNA DPR RI
PENUTUPAN MASA SIDANG II
TAHUN SIDANG 2011-2012**

JUM'AT, 16 DESEMBER 2011

***Assalamu'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh,
Salam Sejahtera bagi kita sekalian,***

Yang kami hormati,

- **Para Wakil Ketua DPR-RI,**
- **Pimpinan Komisi, Badan-Badan, dan Alat Kelengkapan Dewan,**
- **Para Anggota Dewan,**

Pada hari ini Dewan akan menutup Masa Sidang II, yang telah dimulai sejak tanggal 14 November 2011 yang lalu. Mulai besok pagi, Dewan akan memasuki Masa Reses sampai dengan tanggal 8 Januari 2012. Selaku Pimpinan Dewan, kami akan menyampaikan Pidato Penutupan Masa Sidang II Tahun Sidang 2011-2012, sebagaimana diatur dalam Peraturan Tata Tertib Dewan Pasal 218 ayat (2), yang akan menguraikan kegiatan Dewan dalam masa sidang ini, utamanya dalam pelaksanaan tiga fungsi Dewan yaitu fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan.

Sidang Dewan yang terhormat,

Masa Sidang II ini, Dewan fokus pada pelaksanaan fungsi legislasi yang dilakukan oleh Komisi-Komisi, Panitia Khusus, dan Badan Legislasi, untuk melanjutkan pembahasan RUU pada pembicaraan tingkat I maupun menyusun naskah akademik bagi RUU baru yang akan menjadi inisiatif DPR. Pelaksanaan fungsi anggaran ditekankan pada kegiatan Badan Anggaran dalam melakukan pendalaman terhadap APBN Tahun 2012. Sedangkan, evaluasi pelaksanaan APBN 2011 dan tindak lanjut Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I BPK-RI tahun 2011 dilakukan oleh Komisi-Komisi DPR dan Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN). Tugas pengawasan dilakukan oleh Komisi untuk membahas hasil kunjungan kerja Masa Reses Persidangan I dan membahas setiap masalah yang berkembang. Adapun tim-tim pengawas yang telah

dibentuk DPR telah bekerja dan melaporkan pelaksanaan tugasnya pada Sidang Paripurna DPR tanggal 13, 15, dan 16 Desember.

Sidang Dewan yang terhormat,

Pencalonan pejabat-pejabat publik juga mewarnai kegiatan Dewan selama Masa Sidang I dan Masa Sidang II. Pejabat publik yang ditangani Komisi-Komisi Dewan sesuai prosedur dan peraturan perundang-undangan, yaitu *pertama*, anggota Dewan Pengawas LPP-TVRI. Setelah melalui *fit and proper test* oleh Komisi I, Rapat Paripurna DPR-RI menyetujui 5 (lima) nama untuk menjadi anggota Dewan Pengawas LPP-TVRI yaitu: Dra. Immas Sunarya, MM; Elprisdad; Indrawadi Tamim, Ph.D.; Bambang Soeprijanto, dan Akhmad Sofyan S.Sos.

Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik-TVRI (LPP-TVRI) bertugas menyusun kebijakan dan strategi pengembangan TVRI serta pengangkatan Dewan Direksi. Dewan berharap, dengan pengangkatan anggota Dewan Pengawas LPP-TVRI ini, dapat segera disusun kebijakan dan strategi pengembangan TVRI serta pengangkatan Dewan Direksi, sehingga TVRI dapat menjadi lembaga penyiaran publik yang dapat berkembang sehat, sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, media kontrol, perekat sosial, dan pelestarian budaya bangsa.

Kedua, calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Proses pencalonan Pimpinan KPK telah berlangsung cukup panjang dan cukup menarik perhatian masyarakat. Proses pencalonan pimpinan KPK ini diakhiri dengan pelaksanaan *fit and proper test* oleh Komisi III DPR-RI beberapa waktu yang lalu. Melalui pemungutan suara, Komisi III memutuskan 4 (empat) calon di antara 8 (delapan) calon yang diusulkan oleh Panitia Seleksi untuk menduduki posisi Pimpinan KPK. Hasil pemungutan suara tersebut akhirnya memutuskan Dr. Abraham Samad, SH. MH., menjadi Ketua KPK didampingi 4 (empat) wakil ketua yaitu: Dr. Bambang Widjojanto, S.H., M.H; Adnan Pandu Praja, S.H., Sp.N. L.LM; Zulkarnain, S.H., M.H.; dan Dr. M. Busjro Muqoddas. Hasil ini telah diberikan persetujuan pada Rapat Paripurna DPR tanggal 6 Desember 2011.

Dewan berharap pada Pimpinan KPK terpilih agar dapat mengemban amanat dan menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya. Berbagai kasus besar korupsi yang sampai saat ini belum terselesaikan, seperti diantaranya dana talangan Bank Century, kasus suap cek pelawat pemilihan Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia, kasus korupsi dan mafia pajak, kasus wisma atlet SEA-Games, segera dapat dituntaskan. Dalam menjalankan tugas, KPK pasti akan menghadapi kendala dan tantangan. Namun kami

percaya, dengan komitmen dan kerja keras, berbagai kendala dapat teratasi. Dengan kominten kerja keras, maka penilaian terhadap KPK yang dianggap melakukan tebang pilih dalam pemberantasan korupsi akan sirna. Pimpinan baru KPK perlu membuktikan dan merealisasikan janji-janjinya kepada publik saat uji kelayakan dan kepatutan.

Ketiga, seleksi untuk mengisi kekosongan 2 (dua) Deputy Gubernur Bank Indonesia. Melalui *fit and proper test* oleh Komisi XI, dilanjutkan dengan pemungutan suara, terpilih 2 (dua) di antara 4 (empat) calon Deputy Gubernur Bank Indonesia yaitu Ronald Waas, dan Muliaman D. Hadad. Dua calon ini disetujui dalam Rapat Paripurna tanggal 13 Desember. Dewan berharap, kedua Deputy Gubernur BI dapat menjalankan komitmennya, mempertimbangkan penurunan suku bunga, memperbaiki sistem pembayaran, semakin meningkatkan komunikasi dengan dunia perbankan, juga mempersiapkan diri menyongsong kehadiran OJK.

Empat, calon ketua dan anggota Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas (BPH-Migas) untuk masa jabatan 2011-2015 telah ditangani oleh Komisi VII. Sesuai keputusan Komisi VII, melalui *fit and proper test*, telah terpilih 9 (sembilan) nama yaitu: Dr. Ir. Andy Noorsaman Sommeng, DEA (Ketua); Dr. M. Fanshurullah Asa, M.T.; Fahmi Harsandono, S.E.; Drs. Sumihar Panjaitan; Ir. Saryono Hadiwidjoyo, SE, MBA; Mayjend. TNI (Purn) Karseno, MBA; Drs. Martin Samodra Ritonga; Dr. Ibrahim Hasyim, SE. MM; dan Ir. Drs. A. Qoyum Tjandranegara Ing. Ec. Selanjutnya mendapatkan persetujuan rapat paripurna DPR tanggal 15 Desember.

Adapun calon-calon lain untuk mengisi keanggotaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI) antar waktu, anggota Komisi Pengawas Haji Indonesia (KPHI) dan calon anggota baru Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) masa jabatan 2011-2016, masih memerlukan proses.

Sidang Dewan yang terhormat,

Masa Sidang II 2011-2012 ada 3 (tiga) RUU yang telah dapat diselesaikan. Yaitu RUU tentang Pengesahan *Comprehensive Nuclear Test-Ban Treaty (CTBT)*/Traktat Pelarangan Menyeluruh Uji Coba Nuklir, dan RUU tentang Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan. Adapun RUU Perubahan UU No. 17 tahun 2008 tentang Pelayaran, tidak berlanjut menjadi RUU baru, karena Pemerintah dan Komisi V DPR sepakat untuk tidak melakukan perubahan. Sampai saat ini masih terdapat beberapa RUU yang berada dalam tahap pembahasan/pembicaraan tingkat I, baik yang datang dari inisiatif DPR maupun dari Pemerintah.

Telah diratifikasinya RUU Traktat Pelarangan Menyeluruh Uji Coba Nuklir, Indonesia telah memberikan sinyal yang jelas dan konkret kepada dunia internasional, sekaligus menagih keseriusan komitmen dari negara-negara nuklir di bawah kerangka Traktat Pelarangan Menyeluruh Uji Coba Nuklir untuk bergerak menuju perlucutan senjata nuklir. Dengan demikian, Indonesia telah ikut mencegah upaya suatu negara untuk menjadi negara nuklir baru tanpa melanggar norma-norma hukum, serta mencegah pengembangan dan pemajuan kualitatif jenis senjata nuklir baru.

Beberapa RUU lain yang sudah cukup lama dibahas dan belum dapat diselesaikan karena adanya substansi krusial yang harus dituntaskan, telah diberikan perpanjangan waktu sampai dengan Masa Sidang III. RUU-RUU yang disetujui diperpanjang waktu pembahasannya yaitu: RUU tentang Penanganan Konflik Sosial, RUU tentang Keistimewaan Provinsi DIY, RUU tentang Aparatur Sipil Negara, RUU tentang Sistem Peradilan Anak, RUU tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pembalakan Liar, RUU tentang Pendidikan Tinggi, dan RUU tentang Pendidikan Kedokteran.

Khusus mengenai RUU tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pembalakan Liar, sebenarnya tinggal satu materi pokok yang belum ada kata sepakat, yaitu berkaitan dengan struktur kelembagaan/badan yang akan dibentuk, yaitu Badan Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Untuk RUU tentang Keistimewaan Provinsi DIY, ada dua materi yang memerlukan penyempurnaan dan formulasi melalui kajian oleh pemerintah yaitu berkaitan dengan mekanisme pengisian kepala daerah dan masalah pertanahan. Adapun 2 (dua) RUU yang telah disetujui menjadi RUU DPR yaitu RUU tentang Pangan dan RUU tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani yang ditugaskan kepada Komisi IV, diharapkan segera dibahas pada Masa Sidang III. Telah ada penunjukan menteri oleh Presiden yang akan melakukan pembahasan bersama DPR.

Ada 3 (tiga) RUU lagi yang telah disetujui menjadi RUU DPR untuk memasuki pembahasan pada sidang-sidang mendatang, yaitu RUU tentang Industri Pertahanan dan Keamanan, yang diusulkan oleh Komisi I, RUU tentang Jaminan Produk Halal, diusulkan komisi VIII dan RUU tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, diusulkan Baleg.

Berkaitan dengan banyaknya RUU yang belum selesai dibahas pada tahun 2011, Pimpinan Dewan mengharapkan agar bisa dituntaskan pada Masa Sidang yang akan datang. Kepada para anggota Dewan, kepada Fraksi-Fraksi, dan kepada Pemerintah, sangat diharapkan agar pelaksanaan Prolegnas dapat dimaksimalkan dengan

meminimalisir kendala/hambatan. Tahun 2012, Badan Legislasi melalui persetujuan paripurna telah menetapkan 64 (enam puluh empat) RUU sebagai prioritas, 20 (dua puluh) diantaranya sudah dalam pembicaraan tingkat I, 44 (empat puluh empat) sisanya adalah RUU usul inisiatif DPR dan dari Pemerintah. (Catatan: semula 66 RUU, tetapi RUU tentang Perubahan UU No 16 tahun 2004 tentang ketenagakerjaan dan RUU tentang perubahan UU No. 18 tahun 2003 tentang Advokat di drop).

Sidang Dewan yang terhormat,

Salah satu RUU yang dibatasi masa penyelesaiannya adalah RUU tentang Perubahan UU No. 10 tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD. Dalam RUU ini ada beberapa substansi yang dipastikan akan memakan waktu lama dalam pembahasan. Substansi-substansi tersebut diantaranya tentang sistem Pemilu, ambang batas parlemen, alokasi kursi di setiap Daerah Pemilihan, dan mekanisme konversi suara menjadi kursi.

Perubahan UU No. 10 tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, yang diprakarsai oleh DPR, merupakan salah satu upaya yang dilakukan dalam menata sekaligus mengevaluasi penyelenggaraan Pemilu Legislatif. Meskipun tidak secara eksplisit terfokus pada materi yang berkaitan dengan perubahan sistem Pemilu, namun, Pansus yang dibentuk DPR untuk menangani RUU ini akan membuka ruang bagi pembahasan-pembahasan lain, termasuk metode penghitungan perolehan kursi yang pada Pemilu 2009 lalu menimbulkan banyak persoalan. Kita berharap, DPR dan Pemerintah memiliki kemauan untuk menghasilkan sebuah UU Pemilu yang lebih demokratis, dan menghasilkan wakil rakyat yang lebih akuntabel dan memiliki derajat keterwakilan yang tinggi.

RUU lain yang masih dibahas di Panitia Khusus adalah RUU tentang Perubahan atas UU No. 8 tahun 1985 tentang Organisasi Masyarakat (UU Ormas). Panitia Khusus RUU Ormas telah mulai melakukan pembahasan sejak awal September 2011. Undang-Undang ini perlu direvisi karena sudah tidak mampu lagi menutup celah dinamika Ormas yang begitu banyak tumbuh di Indonesia. Agar kehidupan Ormas tetap berjalan sesuai tujuan organisasi sekaligus tujuan negara, atas dasar amanat konstitusi, maka keberadaan ormas di Indonesia perlu ditata kembali termasuk Ormas asing yang berada di Indonesia.

Berdasarkan informasi yang didapat pada Rapat Pansus RUU Organisasi Masyarakat dengan pejabat Pemerintah, diketahui bahwa saat ini terdapat puluhan ribu Ormas yang sudah terdaftar di kementerian. Berdasarkan data Kementerian Sosial,

terdapat sekitar 19.000 ormas yang terdaftar, sementara Kementerian Agama mencatat, terdapat sekitar 9000 ormas berbasis agama. Yang patut kita cermati adalah bahwa Kementerian Luar Negeri mencatat terdapat sekitar 140 ormas asing yang beraktivitas di Indonesia, namun hanya sekitar 100 ormas yang terdaftar di Kementerian Luar Negeri. Selain itu, umumnya ormas asing juga tidak melaporkan kegiatan dan pengelolaan keuangan kepada Pemerintah sehingga sulit diawasi. Namun, pengaturan Ormas ke dalam UU ini diharapkan tidak membelenggu kebebasan untuk berserikat, berkumpul dan menyampaikan pendapat. Di satu sisi Ormas dapat berkontribusi dalam pembangunan, sehingga keberadaannya dapat diawasi oleh negara, tetapi disisi lain, pengaturan ini tetap menghargai kebebasan berserikat dan berkumpul.

Sidang Dewan yang terhormat,

Dalam kaitan dengan pelaksanaan fungsi anggaran, Dewan mengingatkan Pemerintah untuk terus memantau perkembangan ekonomi dan keuangan global, khususnya perkembangan sektor keuangan dan moneter di kawasan Eropa. Anjloknya mata uang Euro terutama terhadap Dollar AS, secara perlahan-lahan akan berpengaruh juga terhadap perekonomian Indonesia, khususnya ekspor dan impor. Uni Eropa merupakan partner dagang utama Indonesia, selain Amerika Serikat. Krisis finansial yang terjadi di sebagian negara anggota Uni Eropa, patut disikapi dan dicermati dengan terus memperkuat sistem pengaman sektor keuangan dalam negeri, baik fiskal maupun moneter. Ketika perekonomian bergantung kepada ekspor, maka strategi yang harus ditempuh adalah mencari pasar ekspor baru ke kawasan-kawasan lain, seperti Afrika, Timur Tengah, dan Amerika Latin.

Pemerintah tidak bisa mengandalkan dan bergantung kepada lembaga-lembaga keuangan internasional, seperti IMF (*International Monetary Fund*) dan Bank Dunia dalam memperkuat sistem keuangan domestik. Hampir setiap tahun anggaran, Pemerintah selalu melakukan penarikan Pinjaman Luar Negeri, termasuk Pinjaman Program. Oleh karena itu, Dewan menyarankan Pemerintah untuk tidak tergesa-gesa mencairkan komitmen Pinjaman Luar Negeri pada Tahun Anggaran 2012 mendatang, khususnya Pinjaman Program dalam bentuk tunai, kecuali keadaan sangat mendesak karena membengkaknya defisit anggaran di masa datang. Dewan meminta Pemerintah untuk selektif melakukan penerusan Pinjaman Luar Negeri kepada BUMN tertentu, agar tidak menjadi beban terhadap keuangan negara di kemudian hari.

Isu-isu mengenai lambatnya penyerapan anggaran negara tahun 2011, juga menjadi perhatian Dewan. Apabila hal ini terjadi pada pos Belanja Pembangunan (Belanja Modal), maka lambatnya penyerapan anggaran akan berpengaruh terhadap pembangunan proyek-proyek yang didanai APBN. Dalam hal penyerapan anggaran negara, pada umumnya terdapat 3 (tiga) kategori yang dapat mempengaruhi daya serap anggaran, *pertama* adalah target anggaran telah sesuai dengan perencanaan sehingga *out-put* yang diinginkan dapat tercapai. *Kedua* adalah, daya serap anggaran kurang, disebabkan salah dalam perencanaan sehingga target *out-put* dan sasaran yang ingin dicapai tidak terlaksana dengan baik. *Ketiga* adalah, daya serap anggaran yang kurang karena memang terjadi perubahan kebijakan yang mendasar sehingga membutuhkan waktu untuk menyesuaikan dengan situasi dan kondisi terkini.

Dalam konteks penganggaran, sebenarnya Dewan sudah menyetujui sistem penganggaran yang bersifat *multi-years budget*, khususnya dalam pos Belanja Pembangunan atau Belanja Modal. Tetapi, Dewan sangat prihatin apabila Pemerintah justru terkesan hanya menghabiskan anggaran di penghujung tahun anggaran, sehingga penyerapan tidak berlangsung baik. Dewan meminta kepada Pemerintah agar terus memperbaiki sistem penganggaran, termasuk sistem pembiayaan, serta mempercepat pelaksanaan pembangunan proyek dan kegiatan dalam pos Belanja Pembangunan (Belanja Modal) pada APBN Tahun Anggaran 2012, seperti proyek-proyek infrastruktur.

Sidang Dewan yang terhormat,

Pembangunan infastruktur, seperti jalan dan jembatan tetap menjadi perhatian Dewan. Hal ini terutama dikaitkan dengan ambruknya Jembatan Kutai Kartanegara di Provinsi Kalimantan Timur, yang menelan korban jiwa lebih dari 20 orang meninggal dan rusaknya jalur transportasi vital menghubungkan Kota Samarinda dan Tenggarong. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Kepolisian harus melakukan investigasi untuk mengetahui penyebab runtuhnya jembatan dan penanggungjawabnya. Pemerintah harus segera membangun kembali jembatan tersebut, agar roda perekonomian dan mobilitas penduduk tetap berjalan.

Selain itu, Dewan juga meminta Pemerintah untuk segera melakukan audit terhadap beberapa jembatan yang strategis di berbagai daerah, seperti Jembatan Ampera di Sumatera Selatan, Jembatan Bareleng di Kepulauan Riau, Jembatan Suramadu, serta jembatan strategis lainnya yang sudah tua. Ambruknya Jembatan Kutai Kartanegara di Sungai Mahakam merupakan pelajaran bagi kita semua, untuk

mulai membenahi berbagai infrastruktur strategis dan vital di tanah air, seperti jalan negara, dan jalan provinsi, pelabuhan laut, serta bandar udara. Semua fasilitas infrastruktur tersebut sangat penting bagi negara dan bagi masyarakat dalam mendorong perekonomian.

Sidang Dewan yang terhormat

Dalam pelaksanaan fungsi pengawasan, kegiatan Dewan diisi dengan finalisasi atas laporan kegiatan tim-tim pengawas yang telah dibentuk oleh Dewan. Tim-tim tersebut antara lain: Tim Pengawas Bencana Alam Provinsi Jawa Barat, Provinsi Sumatera Barat, dan Provinsi Jambi, Tim Pemantau Pelaksanaan UU No. 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Pelaksanaan UU No. 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, Tim Pengawas DPR-RI terhadap Tindaklanjut Rekomendasi Panitia Angket Tentang Pengusutan Kasus Bank Century dan Tim Khusus Penanganan TKI di Arab Saudi. Semua tim ini telah melaporkan hasil kerjanya dalam Rapat Paripurna DPR tanggal 13, 15, dan 16 Desember.

Khusus mengenai Tim Pemantau Pelaksanaan UU No. 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, telah dilakukan rapat kerja gabungan Komisi Dewan dengan Pemerintah. Dalam rapat kerja yang dipimpin Wakil Ketua Bidang Korpul mengemuka bahwa kebijakan pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat terus berlangsung sesuai dengan kebijakan dasar yang telah ditetapkan Pemerintah, yang mengacu pada 3 (tiga) pilar utama, yaitu bahwa Papua harus tetap dalam wilayah NKRI, berpegang teguh prinsip bahwa pelaksanaan Otonomi Khusus Papua merupakan wahana untuk kesuksesan dan kemajuan pembangunan Papua, dan Otonomi Khusus Papua harus dilaksanakan dengan mengutamakan pendekatan ekonomi dan kesejahteraan.

Penjabaran pendekatan kesejahteraan harus tercermin dalam program dan alokasi anggaran yang ditujukan ke rakyat Papua. Yang terjadi selama ini, anggaran untuk kesejahteraan untuk rakyat papua cukup besar, tetapi kenyataannya masih terjadi masalah kemiskinan yang dialami oleh rakyat Papua. Oleh karena itu, anggaran pembangunan yang dialokasikan ke Papua harus diawasi secara ketat supaya anggaran dan program tersebut tepat sasaran untuk meningkatkan kualitas hidup rakyat Papua.

Pimpinan Dewan meminta agar hasil Rapat Dengar Pendapat Umum antara Komisi I Dewan dengan berbagai elemen masyarakat Papua (Adat Papua, Pemerintah Adat Papua, Presidium Dewan Papua, Tokoh Masyarakat Papua, Tokoh Agama Papua, Asosiasi Mahasiswa Pegunungan Tengah se-Indonesia, Pelaku Sejarah Papua, dan

Koalisi Mahasiswa Papua), pada akhir November 2011 lalu, menjadi masukan penting bagi Unit Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat (UP4B) yang ditugaskan melakukan komunikasi intensif dengan mengedepankan dialog dalam menangani masalah Papua.

Ekskalasi kekerasan terhadap aparat Kepolisian, terutama setelah perayaan HUT OPM (Organisasi Papua Merdeka) 1 Desember yang lalu, sangat memprihatinkan. Pernyataan Panglima Tertinggi OPM yang mengatakan bertanggung jawab atas semua tindak kekerasan/pembunuhan terhadap aparat, patut dijadikan alasan bagi aparat kita untuk melakukan tindakan tegas. Penegakan hukum harus menjadi landasan bagi terwujudnya keamanan wilayah dan masyarakat Papua.

Sidang Dewan yang terhormat,

Dua hari yang lalu, Komisi III DPR-RI telah menerima pengaduan atas peristiwa pembantaian puluhan petani di Kecamatan Mesuji, Tulang Bawang, Lampung. Dalam pengaduan tersebut dilaporkan bahwa selama kurun waktu 2009-2011 tercatat sekitar 30 warga meninggal dunia. Bahkan, pembunuhan sangat sadis terhadap warga telah terjadi pada awal 2011. Pemicu sengketa adalah "tumpang tindih" kepemilikan lahan dan perebutan lahan antara warga dengan investor. Bahkan ada satu grup investor yang mendapatkan lahan lebih dari satu juta hektar di satu provinsi di Sumatera Selatan.

Terhadap pengaduan ini, Komisi III akan melakukan tindak lanjut, mengunjungi lokasi dan mendapatkan keterangan atas kasus ini. Kita meminta kepada aparat Pemerintah Daerah untuk melakukan inventarisasi lahan-lahan yang diperuntukkan bagi investor yang tidak memperhatikan prinsip keadilan. Pimpinan Dewan memberikan dukungan atas langkah cepat yang akan dilakukan Tim Komisi III DPR-RI.

Sidang Dewan yang terhormat,

Terkait dengan pengawasan atas pelaksanaan UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, kami sampaikan bahwa dalam forum Raker, jajaran Kementerian Polhukam telah melaporkan dan menyikapi masalah Pemilukada Aceh tahun 2012 yang meliputi Provinsi Aceh dan 17 Kabupaten/Kota.

Dewan menghimbau agar penjadwalan Pemilukada yang berimplikasi pada penggunaan anggaran negara, sedapat mungkin dilaksanakan secara bijak dan mendapatkan kepastian hukum, sehingga penyelenggara Pemilukada di Aceh dapat

melaksanakan tugasnya dengan tenang dan tidak terbebani dengan kekhawatiran melakukan kesalahan prosedur. Pemilukada di Aceh yang akan berlangsung bulan Februari 2012 diharapkan berjalan dengan aman, tertib, damai dan lancar.

Tim Pengawas Kasus Bank Century masa tugasnya berakhir tanggal 17 Desember. Sebagaimana kita ketahui, ruang lingkup pengawasan yang dilakukan oleh Tim Pengawas Kasus Bank Century adalah: pengawasan terhadap proses hukum seluruh penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang yang berindikasi perbuatan melawan hukum; pengawasan dalam rangka melakukan pemulihan aset yang telah diambil secara tidak sah oleh pelaku tindak pidana; pengawasan kebijakan dan langkah-langkah yang diambil pemerintah dan/atau Bank Indonesia dalam menyelesaikan permasalahan yang menimpa nasabah PT. Antaboga Delta Sekuritas; dan mendorong perubahan dan pembentukan berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengelolaan sektor moneter dan fiskal.

Dari hasil kegiatan yang dilakukan oleh Tim Pengawas Kasus Bank Century dalam beberapa bulan terakhir, disimpulkan bahwa penanganan kasus korupsi oleh KPK belum mencapai hasil yang berarti dan masih terjadi perbedaan pandangan tim pengawas/rekomendasi DPR dengan pandangan KPK. Dalam pelaksanaan proses penelusuran aliran dana, belum secara tuntas diselesaikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Terdapat banyak hambatan teknis dalam pelaksanaan audit forensik, sehingga BPK membutuhkan waktu yang lebih dari yang telah ditetapkan.

Sidang Dewan yang terhormat,

Dewan melihat bahwa dalam penyelenggaraan haji pada tahun ini tidak lebih baik dari penyelenggaraan haji pada tahun lalu. Penyelenggaraan haji tahun ini masih saja menghadapi berbagai masalah, yang ironisnya berbagai masalah itu selalu muncul dalam setiap penyelenggaraan ibadah haji. Tim Pengawas DPR-RI terhadap Penyelenggaraan Ibadah Haji tahun 1432 H/2011 M, menemukan setidaknya 8 (delapan) masalah dalam penyelenggaraan haji yaitu: (1) pelayanan pemondokan; (2) pelayanan catering; (3) pelayanan transportasi darat; (4) pelayanan kesehatan; (5) pelayanan keamanan; (6) jemaah haji non kuota; (7) pelayanan bimbingan haji; (8) pengorganisasian pelaksanaan ibadah haji.

Rapat Kerja Komisi VIII DPR-RI dengan Menteri Agama, dengan agenda "Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1432 H/2011 M dan Beberapa Antisipasi untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Bagi Jemaah Haji, serta Tanggapan dan Laporan Hasil Pengawasan Komis VIII DPR RI". Disimpulkan antara lain: [1] Komisi VIII

dan Menteri Agama sepakat bahwa masing-masing akan melakukan pendalaman terhadap laporan hasil evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji 1432 H/2011 M; [2] Komisi VIII DPR RI dan Menteri Agama sepakat dan berkomitmen untuk melakukan perbaikan dalam peningkatan pelayanan pelaksanaan Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1432 H/2011 M secara menyeluruh.

Untuk memperbaiki penyelenggaraan haji, ada pemikiran di kalangan Dewan, perlu ada pemisahan antara regulator dan operator. Selama ini kedua fungsi tersebut ditangani oleh Kementerian Agama. Jalan terbaik untuk memperbaiki penyelenggaraan haji adalah dengan melakukan revisi terhadap UU No. 13 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji. Revisi ini dilakukan semata-mata untuk memperbaiki penyelenggaraan ibadah haji yang makin baik dan profesional.

Sidang Dewan yang terhormat,

Perhelatan pesta olahraga se-Asia Tenggara yang berlangsung selama 10 hari di Palembang dan Jakarta telah berlangsung dengan sukses, baik dari segi prestasi maupun penyelenggaraan. Indonesia telah menjadi juara umum dengan meraih 182 medali emas, 151 medali perak, dan 143 medali perunggu. Kepada seluruh atlet, pelatih dan ofisial yang telah mengharumkan nama Indonesia, kami ucapkan selamat, juga kepada Pemda Sumatera Selatan, Pemda DKI Jakarta dan pihak-pihak lain. Kepada Kemenpora, KONI, dan seluruh jajarannya, kami sangat mengapresiasi kerja keras yang telah dilakukan demi suksesnya pesta SEA Games ke-26.

Indonesia harus segera mempersiapkan diri untuk mengikuti ajang pesta olahraga yang lebih besar seperti ASIAN Games dan Olimpiade. Kiranya kesuksesan ini bisa menjadi momentum bagi kebangkitan olahraga Indonesia.

Sidang Dewan yang terhormat,

Pada akhir bulan November lalu, Panja MDG's BKSAP DPR RI mengadakan sesi khusus atau *joint session* dengan UNESCO yang bertemakan "*the Millenium Development Goals and Poverty Eradication*". Direktur Jenderal UNESCO Mrs. Irina Bokova turut ambil bagian dalam sesi ini. Dalam pertemuan tersebut, fokus utama pembahasan adalah pengentasan kemiskinan. Suatu sinergi yang ideal antara Pemerintah, DPR-RI dan organisasi internasional untuk mencari alternatif pendekatan dalam upaya pengentasan kemiskinan. Ketua Panja MDG's BKSAP DPR-RI Dr. Nurhayati Ali Assegaf menyatakan bahwa di tingkat legislasi, DPR RI berkewajiban untuk

mengeluarkan segala instrumen legislasi yang menjamin terpenuhinya hak ekonomi, sosial dan budaya bagi seluruh warga negara. Diharapkan agar sesi khusus ini dapat membawa Indonesia lebih maju menuju tercapainya tujuan-tujuan MDG's.

Pimpinan Dewan menyambut baik 9 (sembilan) capaian utama yang telah disepakati dari Konperensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN yang berlangsung di Bali, 17-19 November 2011. Capaian tersebut mencakup langkah-langkah untuk memperkuat komunitas, pertumbuhan ekonomi, pembangunan arsitektur kerjasama kawasan, keamanan, peran global, serta upaya mempertahankan perdamaian dan keamanan melalui penanganan terorisme dan kejahatan lintas-negara.

Tiga dokumen yang ditandatangani pada saat KTT-ASEAN ke-19 antara lain *Agreement of the Establishment of the ASEAN Humanitarian Assistance (AHA) Center*. Dengan dibentuknya AHA Center maka koordinasi tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi bencana dan mitigasi bencana dapat dilakukan lebih efektif dan efisien. Berbagai mitigasi bencana dan pelatihan dapat dilakukan di AHA Center. Hal ini sangat menguntungkan Indonesia, karena kita menjadi pusat penanggulangan bencana di ASEAN. KTT-ASEAN juga menghasilkan Deklarasi kesatuan dalam keragaman budaya untuk memperkuat komunitas ASEAN, serta *Memorandum of Understanding (MOU)* antara ASEAN dan China pada kerjasama di bidang kesehatan.

Keberhasilan penyelenggaraan KTT-ASEAN di Bali, diharapkan mampu menjadikan Asia Tenggara sebagai kawasan yang makin menarik bagi berbagai pihak untuk menanamkan investasinya. KTT-ASEAN yang diiringi dengan KTT terkait lainnya, seperti KTT Asia Timur, menunjukkan bahwa ASEAN dalam konstelasi politik regional maupun internasional, memiliki posisi penting. Di ASEAN, Indonesia yang dinilai memiliki kinerja dan prospek ekonomi yang menjanjikan, harus dapat memanfaatkan peluang tersebut dan tidak kehilangan momentum karena dunia telah benar-benar mengakui pentingnya ASEAN sebagai bagian dari perekonomian global.

Sidang Dewan yang terhormat,

Sebagai sebuah bangsa, kita perlu terus mencermati perkembangan lingkungan strategis di kawasan, termasuk dengan adanya rencana penempatan 2.500 pasukan marinir AS di Darwin, Australia. Demikian pula, kehadiran pangkalan militer asing di negara tetangga manapun harus diantisipasi implikasinya bagi stabilitas kawasan dan keamanan domestik Indonesia

Sidang Dewan yang terhormat,

Demikianlah pokok-pokok kegiatan yang telah dilakukan Dewan dalam Masa Sidang II serta evaluasi permasalahan yang menjadi perhatian Dewan selama Masa Persidangan II. Selanjutnya, Pimpinan Dewan mengucapkan **Selamat Natal bagi umat Kristiani, serta Selamat Tahun Baru 2012**. Semoga Tuhan yang Maha Esa memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua di tahun yang baru nanti. Amien.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi wabarakatuh.

KETOK 3 X

Jakarta, 16 Desember 2011

**KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

Dr. H. Marzuki Alie